



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang selama ini dipakai. Secara sadar atau tidak sadar praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen didasari oleh teori agensi. Teori agensi berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Jensen *and* Meckling (1976) dalam Jao dan Gagaring (2011) memandang baik principal maupun agen berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan diri sendiri, sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal. Konflik ini tidak lepas dari kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

Pemisahan pemilik dan manajemen didalam literature akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Jensen *and* Meckling (1976) dalam Ogolmagai (2013)

mendefinisikan ulang hubungan keagenan *Shareholder (Principal)* dan manajer (*agent*). Model mereka didasari pada concentrated ownership, pada kondisi ini maka manajer dapat berbeda kepentingan dengan *shareholder*. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Tujuan dari teori agensi adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik principal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*the belief revision role*). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara principal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*the performance evaluation role*).

Jensen and Meckling (1976) dalam Aditama dan Anna (2012) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan pihak lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. *Principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena

ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

Salah satu masalah yang muncul dari teori agensi adalah asimetri informasi. Anthony dan Govindarajan menyatakan bahwa pemegang saham sebagai pemilik tidak dapat memonitor dan mengendalikan aktivitas yang dilakukan manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja demi kepentingan pemegang saham. Hal ini memicu terjadinya ketidakseimbangan informasi antara pemilik dengan manajemen. Pemilik tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajemen sehingga pemilik tidak dapat memastikan bahwa manajemen telah memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kondisi ketidak seimbangan informasi ini disebut sebagai asimetri informasi.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan keadaan dimana manajemen mengetahui informasi yang lebih banyak dibanding pemilik mengenai kondisi internal perusahaan, prospek perusahaan di masa

yang akan datang dan kinerja manajemen. Asimetri informasi akan memberikan suatu peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba yang dapat memaksimalkan kepentingannya sendiri terutama jika berkaitan dengan penilaian kinerja dimata pemilik.

Eisenhardt (1989) dalam Agustia (2013) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi, yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan berindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Agustia (2013) *agency theory* menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara para *principal* dan *agent*, yaitu:

1. Agency Problem yang muncul ketika (a) timbul konflik antara harapan atau tujuan pemilik atau pemegang saham dan para direksi (*top management*) dan (b) para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen.
2. *Risk sharing problem* yang muncul ketika pemilik dan direksi memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko.

Kepentingan *agent* (manajer) adalah memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri. Dalam hal ini salah satu hal yang cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan *agent* adalah gaji dan bonus yang diberikan oleh perusahaan. Jika bonus ditentukan dari persentase penjualan perusahaan, maka *agent* akan berusaha memaksimalkan kedua hal tersebut agar didapatkan bonus yang maksimal pula. Di sisi lain, *principal* selaku pemegang saham dan pemilik perusahaan akan cenderung lebih menginginkan perusahaan menunjukkan kinerja yang baik dimata public sehingga dapat meningkatkan *value* perusahaan. Kinerja (*performance*) perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajer.

Agent selaku pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi terkait lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dikarenakan *agent* selalu terlibat dalam setiap kegiatan operasional, sedangkan *principal* tidak cukup banyak memiliki informasi jika dibandingkan dengan *agent*. Hal ini memicu terjadinya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh *principal* dengan informasi yang diberikan oleh *agent*. Ketidak seimbangan informasi yang terjadi inilah yang disebut dengan asimetri informasi (*asymmetric information*). Asimetri informasi adalah informasi yang diterima oleh *principal* yang berbeda dengan informasi yang diketahui oleh *agent*. *Principal* tidak menerima informasi yang menggambarkan keadaan perusahaan secara keseluruhan atau dengan kata lain bahwa manajer tidak menyajikan informasi yang selengkapnyanya kepada *principal*.

Terdapat dua bentuk asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse Selection*

Adverse Selection adalah jenis asimetri informasi yang dimana para manajer dan pihak dalam perusahaan lebih banyak mengetahui informasi tentang kondisi dan prospek ke depan perusahaan dibandingkan dengan investor luar. Hal ini dapat dilakukan oleh manajer atau orang dalam perusahaan dengan mengendalikan penyerahan informasi kepada investor sesuai dengan kepentingannya.

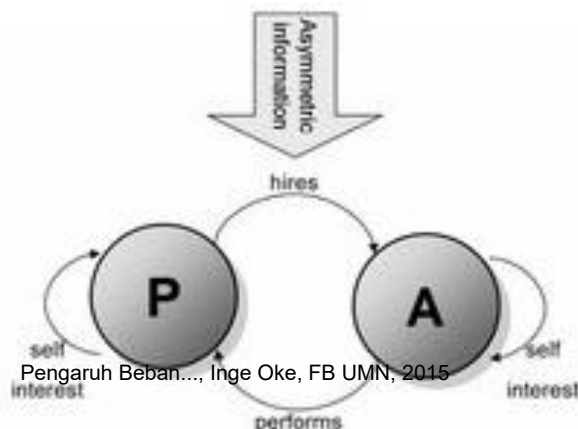
2. *Moral Hazard*

Moral Hazard adalah jenis asimetri informasi dimana kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh para investor (pemegang saham, kreditor) sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan para pemegang saham yang melanggar kontrak.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang berakhir pada terjadinya asimetri informasi dapat pula dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Perbedaan kepentingan *principal* dan *agent*



Sumber: www.google.com

Adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* cenderung akan memicu terjadinya *agent cost*. *Agency cost* adalah biaya yang muncul akibat terjadinya hubungan keagenan, termasuk hubungan kontrak kerja yang terjadi antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Dalam biaya keagenan, yang menanggung biaya keagenan tersebut adalah kedua belah pihak, yaitu *principal* dan *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Jao dan Gagaring (2011), jenis-jenis biaya keagenan adalah: (1) biaya monitoring, (2) biaya bonding, (3) *residual loss*. Biaya monitoring merupakan pengeluaran yang dibayar oleh *principal* untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Biaya bonding adalah biaya untuk menjamin bahwa *agent* tidak akan bertindak yang dapat merugikan *principal* atau untuk meyakinkan bahwa *principal* akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. *Residual loss* adalah pengorbanan berupa berkurangnya kesejahteraan *principal* yang diakibatkan karena terjadi perbedaan antara keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan *accrual* dalam penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Terdapat perbedaan antara sandal akuntansi dan manajemen laba dalam pengertian dan pemahaman. Skandal akuntansi digunakan untuk menyebut praktik akuntansi yang melanggar aturan (Sulistiawan, 2011) . Sedangkan manajemen laba dapat dikatakan sebagai tindakan manajer dalam mengatur laba baik menaikkan atau menurunkan laba namun tidak melanggar aturan akuntansi, seperti mengubah kebijakan atau estimasi akuntansi.

Assih (2004) dalam Rahmi (2013) manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen laba merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa manajemen laba berarti suatu pengurangan dalam keandalan informasi laporan keuangan. Investor mungkin tidak menerima informasi

yang cukup akurat mengenai manajemen laba untuk mengevaluasi return dan resiko portofolionya.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Aditama dan Anna (2012), menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Hal ini erat kaitannya sesuai dengan 3 (tiga) hipotesis dijelaskan dalam *Positive Accounting Theory* :

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-motode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

2. *Debt Covenant hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba.

3. *The Political cost hypothesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tariff pajak, tuntunan buruh, dan lain sebagainya.

Pihak agen akan melakukan tindakan manajemen laba jika didorong oleh keinginan dalam diri sendiri maupun didorong oleh berbagai factor dan motivasi dari luar.) Terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan manajemen laba, yaitu:

1. Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham (Principal) akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah yang relatif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relative besar akan diberikan jika manajer mampu mencapai laba yang ditetapkan oleh pemegang saham. Pengukuran kinerja manajemen salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba skema bonus ini memotivasi manajer memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup kemungkinan adanya sikap optimis manajer.

2. Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Untuk mendapatkan dana dari kreditor, maka manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Dan untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul.

3. Motivasi Pajak

Perusahaan juga cenderung melakukan tindakan manajemen laba untuk tujuan perpajakan. Dalam hal ini, perusahaan cenderung menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

4. Motivasi Penjualan Saham

Motivasi ini banyak digunakan perusahaan yang akan *go public* ataupun yang sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya kepada publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offerings* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Demikian juga dengan usahanya, perusahaan akan menjual sahamnya ke publik baik melalui penawaran kedua, penawaran ketiga dan seterusnya (*Seasoned Equity Offering-SEO*), melalui penjualan saham kepada

pemilik lama (*Right Issue*), maupun melakukan akuisisi perusahaan lain. Proses penjualan saham perusahaan ke publik akan mendapatkan respon positif jika perusahaan mampu menunjukkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja yang dilihat oleh calon investor adalah penyajian laba pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini yang cenderung mendorong manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba agar mendapatkan respon yang positif dari publik.

5. Motivasi Penggantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sektor periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung melakukan tindakan manajemen laba dengan memaksimalkan laba agar performa kinerjanya tetap terlihat baik pada tahun berakhir masa jabatan.

6. Motivasi Politis

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan industri strategis perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik. Jadi, pada aspek politis ini, manajer cenderung melakukan tindakan manajemen laba untuk menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Hal ini dilakukan

untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak menarik perhatian pemerintah, media, atau konsumen yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis perusahaan. Rendahnya biaya politis akan menguntungkan manajemen.

Berdasarkan penjelasan motivasi manajemen laba tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada suatu ketika kondisi yang mana pihak manajemen tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan maupun laba yang dihasilkan melebihi dari target laba yang ditentukan, maka manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba, motivasi manajer melakukan manajemen laba dibagi menjadi dua tujuan, yang pertama ditujukan untuk meningkatkan utilitas menejer itu sendiri, yaitu dalam hal memaksimalkan perolehan bonus, yang kedua meningkatkan nilai perusahaan seperti menghindari pelanggaran kontrak, meminimalkan biaya politik, meminimalkan besarnya pajak serta memaksimalkan nilai perusahaan pada saat penawaran saham perdana.

2.3 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tariff pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Mengingat bahwa kebijakan akrual tersebut merupakan cara manajer melakukan

manajemen laba dan beban pajak tangguhan ini merefleksikan kebijakan akrual tersebut dengan besaran beda waktu yang dihasilkan, Menurut Waluyo (2012) beban pajak penghasilan terdiri atas beban pajak kini (dalam tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan. PSAK No. 46 memberikan beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu: (1) Beban Pajak (*tax expense*), (2) Pajak Kini (*current tax*), (3) Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan. Beban Pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Pajak Kini (*Current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam periode atau tahun berjalan. Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan adalah Jumlah beban (penghasilan) Pajak Tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau asset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan beban pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2012).

PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan atau Wajib Pajak memperlakukan konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi keuangan sama dengan perlakuan akuntansi terhadap transaksi tersebut. Menurut Waluyo (2012) Pajak Tangguhan

sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mandating sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan beban pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.

Dengan berlakunya PSAK No. 46 timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deferred tax expense*) atas *future tax effect* (efek pajak masa depan) dengan menggunakan pendekatan *the asset and liability method* (metode kewajiban Laporan Laba Rugi) yang sebelumnya lazim digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan (Moh. Zain, 2007:193) dalam Aristanti dan Cynthia (2012). Pajak tangguhan dapat dibedakan menjadi Aktiva Pajak Tangguhan (*deferred tax asset*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax Liabilities*). Menurut PSAK No. 46, aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Disisi lain, terdapat kewajiban pajak tangguhan yang merupakan jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Beban pajak tangguhan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Beban Pajak Kini (*Current tax*), (2) Beban Pajak Tangguhan/Pendapatan Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*). Seperti yang dijelaskan sebelumnya beban pajak tangguhan akan menimbulkan

kewajiban pajak tangguhan, dan sebaliknya pendapatan pajak tangguhan dapat menimbulkan asset pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negative yang dapat mengakibatkan beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut undang-undang. Kewajiban pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

Philips *et al.* (2003) menganalisis penggunaan beban pajak tangguhan dalam mengidentifikasi manajemen laba yang dilakukan untuk mencapai tiga tujuan pelaporan laba, yaitu menghindari kerugian, menghindari penurunan laba, dan menghindari kegagalan memenuhi prediksi laba oleh analis. Mereka juga membandingkannya dengan tiga model akrual. Hasil penelitiannya menemukan bahwa beban pajak tangguhan secara signifikan dapat mendeteksi perilaku manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mencapai dua tujuan pelaporan, yaitu menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Sementara untuk menghindari kegagalan memenuhi prediksi laba oleh analis, beban pajak tangguhan tidak signifikan secara statistic. Dalam hal ini Philips *et al* (2003) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat memberikan penjelasan tambahan kepada *accrual* dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Metode beban pajak tangguhan merupakan salah satu metode akuntansi yang berhubungan dengan kebijakan akrual yang ditetapkan oleh manajemen. Perusahaan diwajibkan secara periodic untuk mengevaluasi apakah kewajiban perpajakan yang ditangguhkan memang dapat direalisasikan di masa mendatang. Apakah realisasi

terhadap aset diragukan, maka harus ada penilaian kembali terhadap aset yang bersangkutan. Pertimbangan bahwa suatu aktiva atau kewajiban pajak tangguhan dapat direalisasikan di masa yang akan datang bersifat sangat subjektif, sehingga dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan manajemen laba melalui kebijakan akrual yang dapat direayasa, maka beban pajak tangguhan ini dijadikan suatu ukuran dalam mendeteksi manajemen laba. Beban pajak yang dijadikan variable dalam penelitian ini diperoleh dari beban pajak tangguhan pada periode laporan keuangan dibagi dengan total asset pada periode sebelumnya.

2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Menurut Brigham dan Gapenski “*profitability is the net result of a number of policies and decisions.*” Brigham dan Houston (dalam Mardi, 2008) juga menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan dalam perusahaan. Setiap perusahaan yang didirikan, tentu diorientasikan untuk mendapatkan laba dengan tidak mengorbankan kepentingan pelanggan untuk mendapatkan kepuasan. Perolehan laba merupakan ukuran keberhasilan kinerja financial perusahaan. Kaplan dan Norton (2000:23) dalam Aristanti (2012) menyatakan bahwa, “Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan.”

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) menyatakan bahwa pengembalian atas investasi modal merupakan indikator penting atas kekuatan perusahaan dalam jangka panjang. Angka ini menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi (laba) dan neraca (pendanaan) untuk menilai profitabilitas. Ukuran profitabilitas ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ukuran kekuatan keuangan jangka panjang lainnya atau solvabilitas yang hanya mengandalkan pos neraca (misalnya rasio utang terhadap ekuitas). Angka ini dapat mengungkapkan pengembalian atas investasi modal secara efektif dari berbagai perspektif kontributor pendanaan yang berbeda (kreditor dan pemegang saham).

Profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atau investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atau efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.

Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan (Supriyono, 1999). Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap

badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Profitabilitas keuangan perusahaan dideskripsikan dalam bentuk laporan laba-rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan korporasi, yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Berdasarkan *financial report* yang diterbitkan perusahaan, selanjutnya dapat digali informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, struktur permodalan, aliran kas, kinerja keuangan dan informasi lain yang mempunyai relevansi dengan laporan keuangan. Profitabilitas suatu perusahaan sudah tentu merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangannya, oleh sebab itu untuk mengukur profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan keuangannya.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor dalam praktik manajemen laba karena berdasarkan pada hipotesa bonus plan dimana insentif manajer pada umumnya didasarkan pada profitabilitas perusahaan. Karena profitabilitas dapat dijadikan indikasi dalam penelitian ini menggunakan proksi (pengukuran) *Return On Asset (ROA)*.

Perusahaan yang memiliki ROA lebih tinggi cenderung melakukan manajemen laba karena manajemen mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba pada periode tertentu. Hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh

Aristanti dan Cynthia (2012) bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

2.5 Leverage

Salah satu factor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang (*leverage*). Solvabilitas (*leverage*) digambarkan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Agustia (2013) rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. *Leverage* dapat dipahami sebagai penaksiran dari resiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya, *leverage* semakin besar menunjukkan resiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah memiliki resiko *leverage* yang lebih kecil.

Jensen and Meckling (1976) dalam Agustia (2013) mengatakan tentang *moral hazard* untuk menjelaskan *agency cost of debt*, bahwa level hutang tinggi akan menyebabkan perusahaan untuk memilih pada proyek-proyek investasi berisiko secara berlebihan. Masalah kerugian juga dapat memberikan kontribusi atas kebijakan pendanaan melalui hutang.

Dengan tingginya rasio *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan tidak *solvable*, artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total assetnya. Karena *leverage* merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang terhadap keseluruhan

aktiva suatu perusahaan, maka apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan asset yang tinggi namun resiko *leverage* nya juga tinggi, maka akan berfikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Karena dikhawatirkan asset tinggi tersebut di dapat dari hutang yang akan meningkatkan resiko investasi apabila perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.

Keputusan manajemen untuk berusaha menjaga agar rasio *laverage* tidak bertambah tinggi mengacu pada teori *pecking order theory* menyatakan bahwa perusahaan menyukai *internal financing* dan apabila pendanaan dari luar (*eksternal financing*) diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu obligasi kemudian diikuti sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru apabila mencukupi, perusahaan akan menerbitkan saham. Pada intinya apabila perusahaan masih bias menggunakan sumber pendanaan internal maka sumber pendanaan internal maka sumber pendanaan eksternal tidak diusahakan. Sehingga dapat disimpulkan rasio *leverage* yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan.

2.6 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Keberadaan pajak sebenarnya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, disisi lain akuntansi merupakan sistem pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan. Secara spesifik sistem perpajakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan Negara, sebaliknya sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi tentang kinerja kerja perusahaan, dan diharapkan dapat menekan asimetris

informasi yang mungkin terjadi antara pihak manajemen sebagai pihak internal dan pengguna laporan sebagai pihak eksternal.

Metode pajak tangguhan merupakan salah satu metode akuntansi yang berhubungan dengan kebijakan akrual yang ditetapkan oleh manajemen. Perusahaan diwajibkan secara periodic untuk mengevaluasi apakah manfaat atau kewajiban perpajakan yang ditangguhkan memang dapat direalisasi di masa mendatang. Apabila realisasi terhadap asset diragukan maka harus ada penilaian kembali terhadap asset yang bersangkutan. Pertimbangan bahwa suatu aktiva atau kewajiban pajak tangguhan dapat direalisasikan di masa yang akan datang bersifat sangat subjektif, sehingga dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan manajemen laba melalui kebijakan akrual yang dapat direkayasa. (Yullyan, 2006 dalam Aristanti dan Cynthia 2012).

Menurut Scott (2000) dalam Aristanti dan Cynthia (2012) perpajakan dapat menjadi motivasi untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak adalah dengan menggunakan metode akuntansi dalam perhitungan nilai persediaan, depresiasi dan cadangan-cadangan yang diperbolehkan.

Berdasarkan penelitian diatas penelitian ini menghipotesiskan sebagai berikut:

Ha₁ : Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba

2.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan (return) bagi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ang, 1997 dalam Aristanti dan Cynthia, 2012). Nilai ROA yang semakin tinggi berarti perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba, sehingga nilai perusahaan meningkat (Brigham, 2001 dalam Aristanti dan Cynthia, 2012). Kinerja perusahaan yang semakin baik dan nilai perusahaan yang meningkat akan memberikan harapan-harapan kepada manajemen untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam menyusun laporan keuangan yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan maupun kepentingan pihak manajemen sendiri.

Profitabilitas merupakan salah satu factor dalam praktik manajemen laba karena berdasarkan pada hipotesa bonus plan dimana insentif manajer pada umumnya didasarkan pada profitabilitas perusahaan. Karena profitabilitas dapat dijadikan indikasi dilakukannya manajemen laba dalam perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi (pengukur) *return on asset (ROA)*.

Berdasarkan penelitian diatas penelitian ini menghipotesiskan sebagai berikut:

Ha₂ : Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen laba

2.8 Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Laba

Leverage adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aset perusahaan.

Rasio ini menunjukkan besarnya besar aset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai

dengan hutang. Hasil penelitian Mamedova (2008) dan Oktovianti dan Agustia (2013) yang menyatakan bahwa leverage perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen melakukan earnings management. Dalam teori keagenan, semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang yang berbasis akuntansi, lebih memungkinkan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa datang ke periode saat ini (Watts and Zimmerman, 1990) dalam Jao dan Gagaring (2011). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Ha₃: Leverage ratio berpengaruh memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

2.9 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas dan Leverage terhadap Manajemen Laba secara Bersama-sama

Aristanti dan Cynthia (2012) meneliti tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan diproksikan dengan *DTE* dan profitabilitas diproksikan dengan *ROA*. Dian (2013) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance*, *free cash flow* dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. *Leverage* yang diproksikan sebagai *DAR*. Oleh karena itu penelitian ini akan diuji kembali pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba. Pada penelitian ini Beban Pajak Tangguhan diproksikan dengan *DTE* yaitu membandingkan beban pajak tangguhan dengan jumlah asset, Profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* yaitu dengan membandingkan Laba Bersih dengan Total Aset, *Leverage* yang diproksikan dengan *DAR* yaitu dengan membandingkan total

kewajiban dengan total asset, dan Manajemen Laba yang diproksikan dengan *Discretionary accruals*. Dengan demikian hipotesis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba adalah:

Ha₄ : Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan *Leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Berdasarkan telaah teori dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2

Model Penelitian

